

PAKDIMAS

JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI MUJAHIDIN



PUBISHER :
LPPM STIE MUJAHIDIN



PENGELOLA

Chief Editor : Moh. Sabran, S.Pd., MM

Editor : 1. Ilham, S.Pd, MM
2. Angga Prayudha, S.E., M.M

Layout : 1. Ayuwandira M. Morad, SE., M.M
2. Ricard Reza, S.Sos

Production : 1. Muhammad Irvan, S.Kom., M.M
2. Ilham Jaya Permana, S.E., M.M

Reviewer :

1. Dr. Rahman Alatas, S.E., M.M

2. Edi Yanto, S.E., M.M

3. Andhy Saputra, S.E., M.M

4. Prasetio Ariwibowo, S.MB. M.M., PhD.

5. Dr. Deasy Wulandari, S.E., M.Si.

6. Edy Yulianto Putra, S.M, M.M

7. Irma, S.E., M.M

Sekolah tinggi ilmu ekonomi
mujahidin

Sekolah tinggi ilmu ekonomi
mujahidin

Sekolah tinggi ilmu ekonomi
mujahidin

Universitas Indraprasta PGRI
Jakarta

Universitas Jember

Universitas Internasional
Batam

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Panca Bhakti Palu

Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin Tolitoli
Jln. Dr. Samratulangi No. 51 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli
Sulawesi Tengah 94513
Telp/WA +62 823 1256 3780
Email: ojs@stiemujahidin.ac.id / lppm.stie.mujahidin@gmail.com

DAFTAR ISI

Determinan Proses Pencairan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR)	1-10
Deasy Wulandari, N. Ari Subagio, Nurhayati, Abelia Regita	
Pelatihan Pembuatan Keripik Kelapa	11-16
Ijma, Bustam	
Penyuluhan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Desa Pulias	17-22
Alfansyah Fathur, Moh. Sabran A	
Pendampingan Bagi Dosen STIE Mujahidin Pemutakhiran Dan Integrasi Data Sinta .	23-27
Moh. Sabran A., Ayuwandira M. Morad	
Program Kemitraan Masyarakat Melalui Pengembangan Manajemen Keuangan BUMDES Usaha Bersama Di Desa Kapas Kecamatan Dakompamean Kabupaten Tolitoli	28-32
Edi Yanto, Randy Aziz Syahputra	

Determinan Proses Pencairan Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Perbankan

Deasy Wulandari, N. Ari Subagio, Nurhayati, Abelia Regita

Program Studi Manajemen, Fakultas, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember

Abstrak

Perbankan sebagai lembaga keuangan merupakan perantara pemerintah dengan masyarakat yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Pemberian kredit perbankan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Fasilitas yang dimiliki oleh perbankan adalah Kredit Usaha Rakyat dengan sasarannya adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengetahui proses pencairan pinjaman dan mengidentifikasi permasalahan serta memberikan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Metode atau pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui magang industri. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah ditemukannya beberapa masalah yang dihadapi oleh pihak perbankan dan nasabah dalam proses pencairan pinjaman. Hal ini membutuhkan kerjasama dari kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama sesuai tujuan yang diharapkan. Hasil penelitian ini juga sangat berguna untuk universitas dan instansi dalam rangka melakukan evaluasi dan kebaruan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (pasar).

Keywords: Determinan, Kredit Usaha Rakyat, Perbankan

Abstract

Banking as a financial institution is an intermediary between the government and the public which have an important role in the economy in Indonesia. Funds from the public in the form of savings are channeled back to the community in the form of loans (credit). The provision of bank credit is expected to meet the needs and desires of the community. The facilities owned by banks are People's Business Credit with the target being micro, small and medium enterprises. The purpose of this community service activity is to know the loan disbursement process and identify problems and provide alternative solutions to overcome existing problems. The method or approach used is a qualitative approach through industrial internships. The result of this community service activity was the discovery of several problems faced by banks and customers in the loan disbursement process. This requires the cooperation of both parties to reach a mutual agreement according to the expected goals. The results of this study are also very useful for universities and agencies in order to evaluate and update the curriculum in accordance with the needs of the world of work (market).

Keywords: Determinants, People's Business Credit, Banking

PENDAHULUAN

Perbankan mempunyai peranan yang penting dalam kemajuan perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan perkembangan usaha di bidang perbankan ini sebagai perantara pemerintah dengan masyarakat. Bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Bank menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit).

Kredit adalah perjanjian kontrak peminjam menerima sejumlah uang atau sesuatu yang berharga dengan persetujuan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain. Perjanjian ini dilandasi dengan rasa saling percaya dengan pihak peminjam yang berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Adanya pemberian kredit ini dengan harapan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Bank sebagai perantara keuangan akan memperoleh keuntungan dari peminjam (bagi hasil). Sebaliknya, masyarakat sebagai peminjam dikenakan kewajiban pembayaran atas pinjamannya dan biaya administrasi dengan nominal sesuai kebijakan setiap perbankan.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan modal kerja kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha yang produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan bagian dari pembiayaan bagi masyarakat yang membangun usaha di berbagai bidang, seperti perikanan, kelautan, pertanian, kehutanan, perindustrian dan usaha koperasi simpan pinjam. Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini ditujukan untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dan sudah berjalan minimal 6 bulan. Secara umum, proses pencairan kredit membutuhkan waktu mulai dari 7 hari hingga 14 hari kerja sejak dilakukan survei sampai persetujuan dan pencairan dilakukan. Hal ini akan disesuaikan dengan cepat atau tidaknya seseorang dalam memenuhi persyaratan yang ada.

Selain Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdapat juga kredit yang diberikan kepada calon debitur dengan sumber pembayaran *Repayment* yang berasal dari sumber penghasilan tetap atau *fixed income*. Kredit ini diberikan untuk keperluan pembiayaan produktif dan non produktif misalnya, pembelian barang bergerak atau tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan kuliah atau sekolah, pengobatan maupun pernikahan. Jenis pinjaman ini ditujukan bagi para pegawai yang memiliki penghasilan tetap maupun pensiunan. Dalam memperlancar tugas-tugas perbankan untuk memberikan kredit maka perlu disusun suatu prosedur administrasi pengajuan kredit yang mudah dan tidak rumit. Administrasi pengajuan kredit merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam lembaga keuangan (bank) khususnya dalam bidang kredit yang pada akhirnya akan mendukung kelancaran tugas-tugas perbankan pada umumnya.

Program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memfokuskan pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat untuk pembiayaan modal kerjanya. Selain itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat diperuntukkan bagi siapa saja asalkan memiliki jaminan yang sesuai dengan nominal kredit yang dipinjam. Suku bunga yang terdapat pada KUR jauh lebih kecil dibandingkan pinjaman lainnya. Selain itu, syarat pengajuan KUR jauh lebih mudah.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk

1. mengetahui dan memahami proses pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR)
2. mengidentifikasi permasalahan terkait proses pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR)

3. memberikan alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan yang terkait proses pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Tinjauan Pustaka

Determinan

Kata determinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna faktor yang menentukan. Adapun dalam konteks perbankan, factor yang menentukan permohonan kredit calon debitur dikenal sebagai prinsip 5C. Penerapan prinsip dasar dalam pemberian kredit serta analisis yang mendalam terhadap calon debitur, perlu dilakukan oleh bank agar tidak salah dalam menyalurkan dananya, sehingga dana yang disalurkan tersebut dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. (Ismail, 2018:4). Faktor tersebut meliputi :

- 1) *Character* (Watak / Kepribadian)
Calon debitur harus termasuk orang yang bertingkah laku yang baik, dalam artian selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi kewajibannya pada waktu yang telah di tentukan.
- 2) *Capacity* (Kemampuan)
Bank harus mengetahui kemampuan menjalankan usaha calon debitur, karena kemampuan ini yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan sebuah usaha dimasa yang akan datang.
- 3) *Capital* (Modal)
Merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan dalam objek pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan keseriusan calon debitur dalam mengajukan kredit.
- 4) *Condition Of Economy* (Kondisi Perekonomian)
Merupakan analisis terhadap sektor usaha calon debitur yang dikaitkan dengan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang.
- 5) *Collateral* (Jaminan)
Merupakan jaminan yang diberikan kepada calon debitur atas kredit yang diajukan.

Perbankan

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dana atau uang yang dihimpun dalam bentuk simpanan disalurkan dalam bentuk kredit dan dalam usahanya bank juga memberikan jasa keuangan lainnya .

Bank menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan tujuan bahwa dengan adanya intermediasi ini, maka bank dapat mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan menyalurkan dana kepada masyarakat yang sedang membutuhkan melalui pemberian kredit, misalnya pada masyarakat bisnis maka secara tidak langsung akan memberikan pengaruh positif dalam peningkatan ekonomi masyarakat banyak.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya adalah :

- a. Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat penyimpanan uang atau berinvestasi bagi masyarakat.
- b. Menyalurkan dana (*lending*) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Dengan kata lain, bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya.
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri, dan lain sebagainya.

Kredit atau Pinjaman

Dalam undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit ini merupakan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank konvensional kepada nasabah (Admin, 2021).

Unsur-unsur Kredit yaitu :

- a. Kreditur
Kreditur merupakan pihak yang memberikan kredit (pinjaman) kepada pihak lain yang mendapat pinjaman. Pihak tersebut bisa perorangan atau badan usaha. Bank yang memberikan kredit kepada pihak peminjam merupakan kreditur.
- b. Debitur
Debitur merupakan pihak yang membutuhkan dana atau pihak yang mendapat pinjaman dari pihak lain.
- c. Kepercayaan (*Trust*)
Kreditur memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pinjaman (debitur) bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah di per janjikan. Bank memberikan pinjaman kepada pihak lain, sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak peminjam, bahwa pihak peminjam akan dapat memenuhi kewajibannya.
- d. Perjanjian
Perjanjian merupakan suatu kontrak perjanjian atas kesepakatan yang dilakukan antara bank (Kreditur) dengan pihak peminjam (Debitur).
- e. Risiko
Setiap dana yang disalurkan oleh bank selalu mengandung adanya risiko tidak kembalinya dana. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan timbul atas penyaluran kredit bank.
- f. Jangka Waktu
Jangka waktu merupakan lamanya waktu yang diperlukan oleh debitur untuk membayar pinjamannya kepada kreditur.
- g. Balas Jasa
Sebagai imbalan atas dana yang disalurkan oleh kreditur, maka debitur akan membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan perjanjian. Dalam perbankan konvensional, imbalan

tersebut berupa bunga, sementara di dalam bank syariah terdapat beberapa macam imbalan, tergantung pada akadnya.

Fungsi Kredit

Pada dasarnya fungsi kredit ialah pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan usaha. Adapun fungsi kredit secara terperinci sebagai berikut (Lumban Gaol dan Piomas Rosima, 2021):

- a. Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa
- b. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*
- c. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru
- d. Kredit sebagai pengendali harga
- e. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada yang pinjaman di atas Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- serta memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UKM yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah UKM yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain : pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan secara langsung. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha kecil, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, maksudnya usaha kecil dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan dan KSP/USP Koperasi, atau dengan Bank Pelaksana (Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2017)

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode kualitatif melalui magang pada sebuah instansi perbankan (magang industri). Magang industri ini dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Dosen berperan sebagai pembimbing dan mengarahkan proses magang industri mulai awal sampai selesai sekaligus melakukan pembimbingan terhadap laporan akhir magang. Mahasiswa berperan sebagai peserta magang pada industri yang telah dipilih dan ditetapkan oleh koordinator program studi. Objek pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada perbankan di Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur. Jangka waktu penelitian selama dua bulan (delapan minggu) yaitu mulai bulan Maret sampai dengan bulan April 2022. Adapun jam kerja magang industri pada perbankan ini dijadwalkan sebagai berikut :

- a. Hari Senin sampai hari Jumat mulai pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 WIB
- b. Waktu istirahat pada hari Senin sampai hari Kamis mulai pukul 12.00 sampai dengan 13.00 WIB Waktu istirahat pada hari Jumat mulai pukul 11.30 sampai dengan 13.00 WIB
- c. Hari Sabtu sampai hari Minggu merupakan hari libur

Jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode kualitatif melalui magang industri ini ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat
(Magang Industri)

No	Nama Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8	Jumlah waktu
----	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	--------------

									magang
1	Pengenalan lingkungan industry	V							9 jam
2	Konsultasi dan pengarahan	V							48 jam
3	Register berkas nasabah	V	V						15 jam
4	Pengecekan syarat peminjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR)	V	V						15 jam
5	Penyusunan berkas dan data base			V	V				46 jam
6	Proses pendaftaran calon nasabah peminjam Kredit Usaha Rakyat (KUR)			V	V	V			41 jam
7	Pembuatan rekening				V	V	V		48 jam
8	Penyusunan scanning berkas					V	V	V	38 jam
9	Pelabelan berkas pinjaman					V	V	V	59 jam
10	Koordinasi berkas pinjaman dengan teller					V	V	V	59 jam

Manfaat yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :

- Mahasiswa memperoleh pengalaman praktis serta wawasan pengetahuan (pelatihan kerja) khususnya dibidang Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta menguji dan meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam menghadapi situasi kerja baik mengenai sistem maupun mekanisme kerja yang sesungguhnya.
- Universitas memperoleh sarana untuk menjalin kerjasama dengan pihak eksternal (*stakeholder*) sekaligus mengevaluasi kelayakan kurikulum yang berlaku di program studi dengan kebutuhan dunia kerja (pasar).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :

- Pemahaman mengenai proses pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- Adanya identifikasi permasalahan terkait proses pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- Adanya luaran kegiatan berupa alternative solusi kongkrit untuk mengatasi permasalahan yang terkait proses pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Informasi atau data awal pada kegiatan pengabdian masyarakat ini mengenai aktivitas usaha yang dilaksanakan di bidang jasa keuangan yaitu memberikan layanan perbankan sebagai berikut :

- Simpanan meliputi : giro (rupiah dan valas), tabungan), deposito (rupiah dan valas).
- Kredit :

- a. Kredit Komersial meliputi : kredit investasi, kredit modal kerja, kredit modal kerja konstruksi, kredit modal kerja ekspor).
- b. Kredit Konsumtif meliputi: kredit kepada pegawai berpenghasilan tetap (Pegawai Negeri Sipil/PNS, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), kredit kepada pensiunan.
3. Pelayanan Jasa Bank meliputi : kliring, transfer, penjualan cek perjalanan, pelayanan inkaso (jasa penagihan), pelayanan *letter of credit* (L/C).

Dokumentasi terkait kegiatan pengabdian masyarakat pada perbankan di Kabupaten Bondowoso ditunjukkan pada Gambar 1 dan 2.



Gambar 1. Pengecekan berkas persyaratan pengajuan KUR



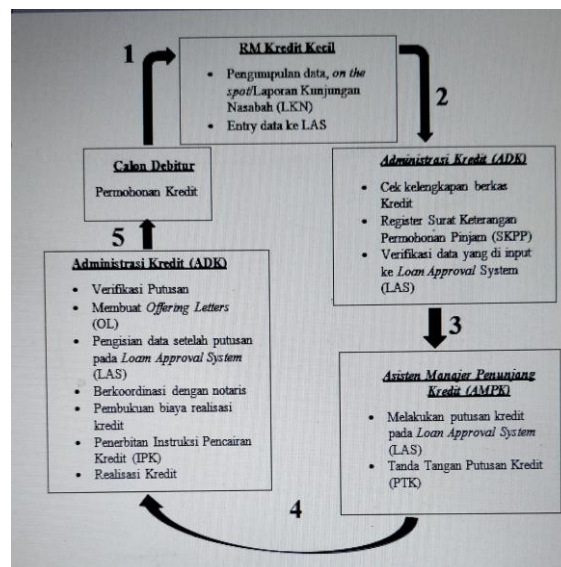
Gambar 2. Penyusunan berkas dan data base

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode kualitatif melalui magang industri ini juga mendapatkan bimbingan dari pihak perbankan. Beberapa divisi pada internal perbankan yang terlibat yaitu : petugas administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Supervisor Penunjang Bisnis (SPB) yang ditunjukkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Dokumentasi bersama Petugas Administrasi Kredit Usaha Rakyat dan Supervisor Penunjang Bisnis

Setelah mendapatkan data awal kegiatan pengabdian masyarakat maka dilanjutkan dengan membuat flowchart untuk proses pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada perbankan di Kabupaten Bondowoso. Flowchart untuk pencairan pinjaman ditunjukkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Flowchart Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Berdasarkan Gambar 4 tersebut maka pada kegiatan pengabdian masyarakat ini teridentifikasi beberapa permasalahan yang muncul dalam proses pengajuan kredit. Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kredit menunggak

Pada awal pengajuan sampai dengan pencairan kredit, pihak perbankan telah melakukan prinsip ke hati-hatian seperti melakukan survei dan terjun langsung pada usaha yang dimiliki debitur untuk memastikan kebenarannya, dan meminta jaminan agar debitur disiplin dalam mengangsur pinjaman. Meskipun demikian masih banyak debitur yang melakukan keterlambatan pembayaran sehingga terjadi kredit yang menunggak.

Kredit yang menunggak adalah suatu kondisi yang dapat menimpa siapa saja yang melakukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR). Seorang debitur menunggak atau terlambat membayar angsuran kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh

pihak bank. Kredit yang menunggak disebabkan oleh pihak peminjam atau debitur yang mengalami kondisi penurunan performa keuangan atau ekonomi yang tidak stabil. Hal tersebut disebabkan adanya bentuk ketidakstabilan dari usaha yang mereka jalankan. Selain itu, bisa juga disebabkan karena debitur mengalami kerugian atau musibah yang tidak terduga.

2. Kredit macet

Kredit Macet adalah pinjaman atau kredit yang mengalami masalah. Debitur benar-benar sudah tidak mampu lagi untuk membayar angsuran kredit yang diakibatkan oleh kebangkrutan atau kepailitan dari usaha. Pada saat realisasi kredit, debitur ditawarkan oleh pihak perbankan untuk menggunakan asuransi kredit yang difasilitasi oleh pihak perbankan. Hal ini bertujuan bilamana terjadi sesuatu yang tidak terduga seperti meninggal dunia, maka pinjaman secara otomatis dilunasi oleh pihak asuransi. Sedangkan, apabila seorang debitur tidak berkenan untuk menggunakan asuransi dan terjadi sesuatu yang tidak terduga seperti meninggal dunia maka pihak ahli waris diharuskan melanjutkan angsuran kredit. Bilamana ahli waris tidak berkenan melanjutkan angsuran kredit maka akan dilakukan pelelangan agunan atau jaminan yang diserahkan kepada pihak Bank.

Alternatif solusi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah sebagai berikut :

a. Melakukan pendekatan secara persuasif dengan nasabah

Pihak perbankan menelepon nasabah untuk mengingatkan bahwa debitur belum menyetorkan angsurannya. Pihak perbankan juga menanyakan alasan mengapa debitur tidak membayar angsuran kredit. Selain itu juga menanyakan kapan kesanggupan untuk membayar tunggaknya (tenggat waktu).

b. Mengunjungi Debitur

Bilamana debitur masih tetap tidak membayar tunggaknya, maka pihak perbankan melakukan kunjungan kepada debitur, dan menanyakan permasalahan mengapa debitur belum membayar tunggaknya. Setelah mendengar penjelasan dari pihak debitur, maka pihak perbankan akan menyimpulkan masalah yang terjadi pada pihak debitur dan mencari solusi agar pihak debitur dapat membayar tunggakan.

c. Surat Peringatan

Debitur akan mendapatkan Surat Peringatan (SP) apabila tidak melakukan penyetoran angsuran melewati tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Apabila pihak debitur masih belum bisa membayar angsurannya, maka pihak bank akan menawarkan beberapa alternatif solusi seperti penghapusan bunga dan penghapusan denda. Debitur diberi keringanan oleh pihak bank dengan membayar sisa pokok hutangnya saja. Pembayaran pokok hutang dengan beberapa macam cara, seperti memberi jangka waktu pembayaran sisa pokok hutang disesuaikan dengan kemampuan debitur, tetapi dalam batas waktu tertentu sesuai aturan bank.

d. Lelang Agunan atau Jaminan

Bilamana debitur telah benar-benar tidak dapat membayar angsuran kreditnya yang sudah disepakati dengan berbagai macam solusi yang ditawarkan pihak bank, tetapi pihak debitur tidak ada itikad baik untuk melunasi angsuran kreditnya, maka pihak bank akan melakukan pelelangan. Dana hasil lelang akan digunakan untuk melunasi pinjaman pokok dan biaya lelang.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode kualitatif melalui magang industri ini telah dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan kegiatan yang telah disepakati. Mulai dari proses pencairan pinjaman Kredit Usaha Rakyat, identifikasi permasalahan dan alternatif solusi sudah terakomodir secara utuh. Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia pada divisi administrasi kredit yang membuat pengerjaan dan pemeriksaan berkas kurang efisien. Selain itu masih terkendala jaringan wifi yang membuat terhambatnya pekerjaan yang secara online. Diharapkan pihak perbankan dapat menambah sumber daya manusia pada divisi administrasi kredit untuk mempercepat pengerjaan berkas serta penambahan kapasitas jaringan eifi untuk memperlancar aktivitas perbankan. Diharapkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan metode kualitatif melalui magang industri ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan pada masa yang akan datang sehingga pihak universitas dan *stakeholder* dapat menjalin kerjasama yang berkesinambungan. Hal ini juga terkait evaluasi dalam pembaharuan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, 2021, Pinjaman: Pengertian, Sumber Dana, Dan Keunggulan Pinjaman, <https://cgkata.blogspot.com/2021/03/pinjaman-pengertian-sumber-dana-keunggulan.html> [Diakses pada tanggal 20 April 2022]
- Ismail, 2018, Manajemen Perbankan, Jakarta :Pranadamedia Group.
- Lumban Gaol dan Piomas Rosima, 2021, Sistem Pengendalian Intern Atas Pemberian Kredit Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Sidikalang, <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/5276> [Diakses pada tanggal 20 April 2022]
- Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, 2017, Manajemen Perkreditan Bank Umum, Bandung : Alfabeta.
- Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45486/uu-no-10-tahun-1998> [Diakses pada tanggal 20 April 2022]

Pelatihan Pembuatan Keripik Kelapa

Ijma¹, Bustam²

¹Prodi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin

² Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin

Abstrak

Desa Malangga merupakan desa wisata nasional. Kegiatan unggulan masyarakat Desa Malangga adalah sektor pertanian dan Perkebunan untuk memenuhi kebutuhan internal desa sebagai komoditi pasar regional. Desa Malangga memiliki kawasaan perkebunan kelapa yang sangat luas. Pemanfaatan buah kelapa di desa malangga hanya dibuat menjadi kopra, minyak goreng, dan bahan tambahan olahan makanan masyarakat. Selain itu buah kelapa juga dapat diolah menjadi kripik, namun masyarakat desa Malangga tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan pembuatan kripik kelapa. Mengingat desa Malangga merupakan desa wisata nasional maka dipandang perlu untuk memberikan Pelatihan pembuatan kripik kelapa masyarakat desa Malangga,. Olahan kripik kelapa dapat dijadikan sebagai cemilan khas desa wisata Malangga yang dapat memberikan potensi di bidang kewirausahaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa Malangga. Adapun tujuan pengabdian ini yaitu 1) Meningkatkan keterampilan masyarakat desa Malangga dalam membuat kripik kelapa. 2) Meningkatkan pendapatan masyarakat. Kegiatan di dilaksanakan tanggal 21 Juli 2022, di desa Malangga Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Hasil yang diperoleh adalah 1) terciptanya produk kripik kelapa desa Malangga. 2) memberikan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan masyarakat. 3) memberikan peluang usaha bagi masyarakat desa Malangga.

Kata Kunci, Kripik Kelapa, Desa Malangga.

Abstract

Malangga Village is a national tourism village. The main activities of the Malangga Village community are the agricultural and plantation sectors to meet the internal needs of the village, as a regional market commodity. Malangga village has a very large coconut plantation area. Utilization of coconut fruit in Malangga village is only made into copra, cooking oil, and additional ingredients for processed food for the community. In addition, coconuts can also be processed into chips, but the people of Malangga village do not have the knowledge and skills to make coconut chips. Considering that Malangga village is a national tourism village, it is deemed necessary to provide training on making coconut chips for the people of Malangga village. Processed coconut chips can be used as a typical snack of the Malangga tourist village which can provide potential in the field of entrepreneurship so that it can improve the economy of the Malangga village community. The objectives of this service are 1) Improving the skills of the Malangga village community in making coconut chips. 2) Increase people's income. The activity was carried out on July 21, 2022, in the village of Malangga, Galang District, Tolitoli Regency. The results obtained are 1) the creation of coconut chips in Malangga village. 2) provide knowledge and improve community skills. 3) provide business opportunities for the Malangga village community.

Keywords, Coconut Chips, Malangga Village.

PENDAHULUAN

Berjarak sekitar 60 menit dari pusat kota Tolitoli, desa Malangga merupakan sebuah desa wisata yang unik selain terkenal memiliki objek wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan desa Malangga juga merupakan desa yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani kelapa (*Desa Wisata Malangga*, n.d.). Pengolahan kelapa di desa Malangga tergolong masih dikerjakan secara tradisional, selain dikeringkan menjadi kopra, buah kelapa di desa Malangga juga masih dijual dalam bentuk biji dengan harga yang relatif murah hanya berkisar antara Rp. 1.500 sampai Rp. 2.000 per biji kelapa.

Kelapa dengan segala kelebihannya dapat dimanfaatkan bukan hanya isi buahnya saja, tumbuhan ini hampir semua bagiannya dapat digunakann dan sering disebut tumbuhan serbaguna dan Kandungan nutrisi yang melimpah pada buah kelapa dapat memberikan nutrisi yang seimbang bagi tubuh manusia. (*Analisis Daya Saing Komoditas Kelapa Di Kabupaten Kupang / Setiawan / AgriTECH*, n.d.)

Kurangnya produk pengolahan dari buah kelapa di desa Malannga diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat terkait aneka olahan kelapa yang dapat menambah nilai ekonomis sebuah kelapa. Membuat produk olahan kripik kelapa sebagai cemilan khas Malangga dapat menambah ikon wisata desa Malangga. Keripik kelapa masih terbilang asing ditelinga masyarakat, karena keripik kelapa belum banyak dipasarkan seperti keripik-keripik lainnya. Sehingga ini merupakan kesempatan baik untuk menjalankan usaha keripik kelapa. Oleh karena itu sangat perlu dilaksanakan kegiatan pelatihan pembuatan keripik kelapa di desa Malangga dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa Malangga.

METODE PELAKSANAAN

Pelatihan pembuatan keripik kelapa dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 20-21 Juli 2022. Tempat pelaksanaan di desa Malangga, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli. Adapun alat-alat dan bahan yang digunakan serta cara pembuatannya sebagai berikut:

1. Alat:
 - a) Sarung tangan
 - b) Pengiris kelapa
 - c) Wajan penggorengan
 - d) kompor
2. Bahan:
 - a) Kelapa 3 Biji (kelapa mengkal, Iris tipis)
 - b) Terigu 1/2 Kg
 - c) Tepung Beras 1 Kg
 - d) Tepung Kanji 1/4 Kg
 - e) Bawang Putih 3 Siung (haluskan)
 - f) Daun Bawang (haluskan)
 - g) Ketumbar Di Sesuaikan
 - h) Daun Jeruk (haluskan).

3. Cara Pembuatan:

- a) Campurkan Tepung Terigu, Tepung beras,dan Tepung Tapioka kedalam wadah kering lalu diaduk hingga rata
- b) Sambil di aduk tambahkan Ketumbar dan tambahkan penyedap rasa.
- c) Tambahkan air. Aduk. Jangan terlalu kental tapi tidak encer.
- d) masukan daun jeruk.
- e) Masukkan bawang yang telah di haluskan.
- f) Lalu masukkan daun bawang. pastikan tidak ada bagian yang menggumpal dan kondisi adonan sudah encer sempurna.
- g) Terakhir masukkan daging kelapa yang telah di iris tipis.

4. Cara Memasak

- a) Panaskan minyak goreng. Pastikan minyak dalam kondisi panas saat anda akan menggoreng.
- b) Masukkan adonan sedikit demi sedikit. Lalu biakan selama beberapa saat.
- c) balik saat warna kelapa telah menguning. Jangan dibalik sebelum warna kelapa menguning karena akan mempengaruhi tekstur dari kelapa.
- d) Setelah keripik matang, angkat dan tiriskan. Pastikan anda menggoreng dengan sempurna karena jika terlalu lama, rasa kelapa akan berubah, atau jika terlalu cepat maka tekstur dari kelapa akan menjadi lembek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pelatihan pembuatan keripik kelapa berlangsung selama dua hari, hari pertama persiapan alat dan bahan yang akan digunakan. Hari kedua praktek pembuatan kripik kelapa. Kegiatan pelatihan ini melibatkan mahasiswa dan narasumber. Sasaran pelaksanaan kegiatan ini adalah ibu-ibu PKK desa Malangga.

Pelaksanaan kegiatan ini diawali dari observasi terkait potensi desa yang bernilai ekonomis namun tidak tersentuh masyarakat. Hasil observasi menunjukkan bahwa sumberdaya yang melimpah di desa Malangga adalah kelapa. Kelapa hanya diolah menjadi pelengkap masakan, minyak goreng, dan kopra saja. Berdasarkan hal tersebut kemudian disampaikan kepada masyarakat rencana pelaksanaan kegiatan pelatihan sekaligus mengedukasikan kepada masyarakat tentang eksistensi kripik kelapa di pasaran. Langkah selanjutnya yaitu menentukan jadwal pelaksanaan pelatihan kemudian mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan.

Mahasiswa dan ibu-ibu PKK bekerja sama dalam persiapan alat dan bahan. Ada yang bertugas menyerut kelapa menjadi potongan-potongan yang tipis, sementara yang lain menghaluskan bumbu atau rempah, ada yang mencampur tepung terigu, tepung beras, tepung kanji dan bumbu yang telah di haluskan. Setelah itu ibu-ibu PKK didampingi mahasiswa menyiapkan proses penggorengan kemudian kelapa yang sudah di serut dicampurkan dengan adonan tepung dan bumbu, lalu digoreng. Berikut ini gambar pelatihan pembuatan keripik kelapa di desa Malangga:





Pelaksanaan pelatihan pembuatan keripik kelapa mendapatkan antusias yang luar biasa dari masyarakat. Kegiatan ini memberikan pengetahuan dan keterampilan baru bagi masyarakat desa Malangga. Kripik kelapa dapat dijadikan sebagai tambahan ikon wisata desa malangga dan dapat memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat desa Malangga.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian msyarakat melalui pelatihan pembuatan kripik kelapa di desa Malangga telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan dimulai dari proses sosialisasi produk pengolahan kelapa sampai dengan proses pengemasannya. Meskipun demikian terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu masih minimnya alat produksi dengan teknologi terbaru yang membuat pelatihan pembuatan kripik kelapa ini masih jauh dari kata sempurna. Alat penggorengan, metode pengeringan kripik yang masih dilakukan dengan cara sederhana. Diharapkan pihak pemerintah dapat membantu masyarakat desa Malangga dalam pengembangan produk olahan kripik kelapa tersebut. Selain itu keikutsertaan beberapa pihak seperti kampus, perbankan sebagai penyedia modal juga sangat diharapkan untuk membantu agar kegiatan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan produk pengolahan kelapa lebih maju lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Analisis Daya Saing Komoditas Kelapa di Kabupaten Kupang / Setiawan / agriTECH. (n.d.). Retrieved May 24, 2023, from <https://journal.ugm.ac.id/agritech/article/view/9527>
Desa Wisata Malangga. (n.d.). Retrieved May 24, 2023, from <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/malangga>

Penyuluhan Peningkatan Pengelolaan Keuangan Bumdes Di Desa Pulias

Alfansyah Fathur¹, Moh. Sabran A.²

¹Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin

²Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin

Abstrak

Kondisi masyarakat Desa Pulias yang mayoritas berpenghasilan rendah dan tidak menentu membuat Desa ini membutuhkan BUMDes sebagai lembaga usaha desa yang mewadahi kreativitas usaha bersama masyarakat. Tujuan dari PkM ini adalah untuk memberi penyuluhan tentang pentingnya keberadaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) untuk menggerakkan perekonomian di Desa serta memaksimalkan kemampuan para pengelola keuangan mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan BUMDes nantinya. Metode yang digunakan yaitu penyuluhan dan pendampingan. Hasil dari penyuluhan ini ialah peningkatan pemahaman masyarakat tentang pendirian dan pengelolaan BUMDes. Kegiatan ini juga berhasil mengedukasi secara mendalam mengenai SAK-ETAP kepada masyarakat sebagai rambu-rambu pelaporan keuangan BUMDes. PkM ini telah mampu menjelaskan secara lengkap kepada masyarakat Desa Pulias mengenai BUMDes, baik dari segi pengelolaan kelembagaan maupun dari pengelolaan administrasi keuangannya. Masyarakat telah memperoleh pengetahuan tentang bagaimana mengoptimalkan potensi Desa Pulias sehingga dapat bernilai komersil yang bermanfaat untuk mendukung pendapatan masyarakat setempat

Kata Kunci: BUMDes, Keuangan Desa

Abstract

The condition of people in Pulias Village, who are mostly low-income and uncertain, makes this village need BUMDes as a village business institution that accommodates business creativity with the community. The purpose of this PkM is to provide counseling on the importance of the existence of Village-Owned Enterprises (BUMDes) to drive the economy in the Village and maximize the ability of financial managers regarding accountability and transparency in future BUMDes financial reporting. The method used is counseling and mentoring. The result was an increase in people's understanding of the establishment and management of BUMDes. This activity also succeeded in educating the public about SAK-ETAP as signs of BUMDes financial reporting. This PkM has been able to fully explain to the people of Pulias Village about BUMDes, both in terms of institutional and management of BUMDes financial administration. The community has acquired knowledge on how to optimize the potential of Pulias Village commercially that is very useful to support local community income.

Keywords: BUMDes, village finance

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut dengan BUMDes adalah suatu lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa bersama dengan peran masyarakat desa setempat dengan tujuan untuk membangun serta memperkuat perekonomian desa dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terdapat di desa tersebut. Agar dapat menunjang kegiatannya, sumber modal kerja BUMDes sebagian besar atau seluruhnya berasal atau dimiliki oleh Desa yang mekanisme kepemilikannya melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa setempat. Mengingat pentingnya keberadaan BUMDes ini maka ia harus hadir atas semangat dan kehendak seluruh masyarakat desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa yang merupakan forum tertinggi yang melahirkan berbagai keputusan utama dalam BUMDes mulai dari nama lembaga, pengangkatan pengurus hingga jenis usaha yang akan dijalankan nantinya. Pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi desa yang dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan keberlanjutan. Oleh karena itu pengelolaan BUMDes yang optimal menjadi suatu keharusan agar perekonomian desa bisa berjalan secara mandiri, efektif dan profesional sehingga peningkatan kesejahteraan sebagai impian seluruh masyarakat Indonesia dapat dicapai.

Desa Pulias merupakan salah satu dari 11 Desa yang terdapat di Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli. Desa ini memiliki luas wilayah +/- 36,3 Ha. Batas-batas wilayah Desa Pulias yaitu: Sebelah utara berbatasan dengan Laut, Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pagaitan, Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuanloboh, Sebelah timur berbatasan dengan Desa Lolean Nono. Desa ini terdiri dari 4 dusun dan 9 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 2.018 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 1.032 orang dan perempuan 986 orang. Mata pencaharian warga adalah sebagian besar sebagai petani, nelayan dan, selain itu juga sebagai pedagang, tukang, pengrajin dan sebagian kecil adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Misi dari pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Pulias ini adalah untuk memberi penyuluhan tentang pentingnya keberadaan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) di tengah-tengah masyarakat Desa Pulias untuk menggerakkan perekonomian di Desa tersebut. Selain itu PkM ini juga bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan para pengelola keuangan mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan BUMDes nantinya.

Hal pertama yang kami temui saat melaksanakan PkM di Desa Pulias adalah masih ada rongga dalam administrasi keuangan di Desa, khususnya dalam pelaporan, meskipun para perangkat Desa telah cukup sigap dalam tugas pokoknya masing-masing. Kekosongan dalam rongga-rongga tersebut tidak dapat terelakkan manakala para perangkat desa dihadapkan dalam kegiatan administrasi keuangan yang terstruktur dan akuntabel, khususnya mengenai isu pelaporan keuangan BUMDes. Hal ini tentu saja tidak boleh serta merta menjadi tanggungjawab para perangkat desa, mengingat pemahaman tentang BUMDes ini masih belum sepenuhnya terserap oleh masyarakat secara utuh.

Tak dapat dipungkiri sebagian besar keberadaan BUMDes, tidak hanya di Desa Pulias melainkan juga di beberapa desa lain Indonesia masih belum dirintis atau masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang benar-benar “menghasilkan”. Bahkan beberapa BUMDes hanya sempat berdiri kemudian mati suri akibat minimnya aktivitas yang dikelolanya. Terdapat beberapa masalah yang menjadi pemicu sulit berkembangnya BUMDes tersebut hingga keberadaannya belum sesuai dengan yang diharapkan. Pertama, terjadi kelatihan terhadap isu tentang BUMDes yang hanya sekedar diikuti oleh para perangkat desa namun sosialisasi yang diperoleh tentang seluk beluk kegiatan BUMDes masih belum optimal. Sejak pemerintah mengesahkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka praktis para aparaturnegara mencanangkan lahirnya BUMDes di seluruh pelosok tanah air. Padahal tanpa adanya infrastruktur yang baik serta SDM yang berkualitas sebagai pengelola BUMDes maka keberadaan BUMDes hanya akan menjadi pelengkap suatu Desa.

Alasan kedua yaitu sejak dahulu telah menjadi kebiasaan yang lumrah ditemui bahwa desa adalah struktur pemerintahan yang mayoritas kegiatannya berjalan atas dasar instruksi dari lembaga di atasnya. Hampir seluruh program kerja yang diusung dan dilaksanakan oleh Kepala Desa dan perangkatnya masih berkuat pada isu atau masalah administrasi. Kendatipun desa mendapatkan porsi pembangunan fisik, anggaran yang diperoleh boleh dibilang tinggal “ujung-ujungnya”. Oleh karena itu lahirlah Undang-Undang Desa yang memberi cukup ruang dan keleluasaan bagi Kepala Desa untuk mengelola keuangan desa, namun pengaplikasian dari mandat Undang-Undang Desa tersebut membutuhkan waktu untuk mempelajari berbagai peran dan tanggung jawab baru berkaitan dengan Keuangan Desa sebagai persiapan hadirnya BUMDes di desanya. Kedua alasan inilah yang menjadi penyebab sulit berkembangnya BUMDes di mayoritas desa di Indonesia, tak terkecuali di Desa Pulias.

Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu dikembangkan program pemberdayaan bagi para perangkat Desa Pulias melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Hadirnya PkM ini dapat menjadi salah satu alternatif solusi bagi isu-isu kemasyarakatan melalui program pemberdayaan masyarakat dengan menjalin kerjasama antar pihak

akademisi, perangkat pemerintah serta peran dari masyarakat. Dengan demikian isu-isu kemasyarakatan tersebut dapat diselesaikan secara optimal dari perspektif akademik.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Pulias ini dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu metode penyuluhan dan pendampingan. Pelaksanaan kedua metode tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penyuluhan

Metode pertama adalah penyuluhan. Kegiatan penyuluhan tentang peran penting Badan Usaha Milik Desa sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya BUMDes dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Penyuluhan dilaksanakan melalui pertemuan dengan masyarakat dan kunjungan ke beberapa rumah warga. Penyuluhan ini sangat penting untuk memberi gambaran kepada masyarakat agar pola pikir tentang pendapatan dan aktivitas ekonomis dapat diarahkan ke upaya-upaya pengembangan potensi desa yang lebih produktif melalui hadirnya BUMDes ini. Tindak lanjut dari penyuluhan ini salah satunya adalah diharapkan masyarakat Desa Pulias dapat membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang mandiri dan produktif secara ekonomi.

2. Pendampingan

Metode kedua adalah pendampingan. Pendampingan yang dilakukan berupa edukasi permasalahan atau isu administrasi yang kerap ditemui oleh perangkat maupun masyarakat desa. Oleh karena itu pendampingan dalam PkM ini berfokus pada aspek non teknis yang orientasinya pada administrasi keuangan BUMDes. Dengan demikian pendampingan tersebut dilaksanakan dengan memberikan edukasi melalui materi-materi tentang administrasi pembukuan dan pelaporan keuangan BUMDes tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluhan tentang peran penting BUMDes dalam menggerakkan ekonomi masyarakat disambut baik oleh masyarakat Desa Pulias. Pemahaman warga tentang BUMDes semakin baik dan berimbang sebab penyuluhan tersebut tetap merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penyuluhan ini berhasil menegaskan kembali kepada masyarakat bahwa pada dasarnya BUMDes memiliki empat tujuan utama, yaitu: 1) Meningkatkan perekonomian masyarakat desa; 2) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa; 3) Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat; dan 4) Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.

Kondisi masyarakat Desa Pulias yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani, nelayan dan pedagang/pengrajin tentu membutuhkan suatu lembaga desa yang mampu mewadahi potensi masyarakat dan potensi alam yang dimiliki Desa Pulias agar dapat menjadi sumber pendapatan baru bagi masyarakat yang mayoritas berpenghasilan minim dan tidak menentu. BUMDes melalui pengelolaan Perangkat Desa yang akuntabel serta peran masyarakat yang bersinergi diyakini akan mampu mengoptimalkan SDA untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat dikomerrsilkan secara berimbang untuk peningkatan pendapatan masyarakat Desa Pulias.

Dalam perjalanannya tentu penyuluhan ini juga menemui beberapa pertanyaan berisi kecemasan masyarakat tentang status kelembagaan serta seberapa aman pengelolaan dari BUMDes ini kedepannya. Oleh karena itu pemateri menjelaskan kembali tentang selu beluk BUMdes untuk menegaskan mengenai status dan pengelolaan BUMDes tersebut, yaitu: 1)Kekuasaan penuh di tangan desa, dan dikelola bersama masyarakat desa; 2)Modal bersama yakni bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat 49% melalui penyertaan modal; 3) Kegiatan operasional menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari nilai budaya atau kearifan lokal; 4)Bidang yang dipilih disesuaikan dengan potensi desa 5)Proses operasionalisasi dikontrol bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan masyarakat; 6)Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa; 7)Pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah.

Hasil dari penyuluhan ini juga terlihat melalui peningkatan pemahaman masyarakat tentang jenis usaha yang akan dikelola oleh BUMDes yang pemilihannya disesuaikan dengan potensi Desa. Jenis – jenis usaha tersebut antara lain: 1)Bisnis Sosial yang berfokus pada pelayanan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar; 2)Keuangan yang berfokus pada pembangunan lembaga keuangan untuk membantu warga memperoleh akses modal dengan mudah dan bunga terjangkau; 3)Bisnis Penyewaan memudahkan warga mendapatkan kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan; 4)Lembaga Perantara yang berfokus pada upaya memperpendek jalur distribusi komoditas warga menuju pasar; 5)Usaha Bersama yang berfoku pada usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang tidak bisa dilakukan warga secara perorangan; 6)Kontraktor yang berfokus pada pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, pemasok berbagai bahan pada proyek desa,, dan lain- lain.

Dari aspek pendampingan pengelolaan administrasi keuangan BUMDes, pemateri berfokus pada standar keuangan dan proses pengelolaan keuangan. Kegiatan pendampingan ini berhasil menjelaskan secara mendalam mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) kepada masyarakat sebagai rambu-rambu bagi para pengelola BUMDes terkait pelaporan keuangan. Pemateri juga memperkenalkan jenis-jenis

laporan keuangan sederhana yang akan disusun oleh pengelola nanti, yaitu laporan laba/rugi, neraca dan arus kas yang merupakan standar pelaporan keuangan untuk akuntansi perusahaan jasa. Dengan demikian PkM ini telah mampu memberikan edukasi secara lengkap bagi masyarakat Desa Pulias mengenai BUMDes, baik dari segi pengelolaan kelembagaan maupun dari pengelolaan administrasi keuangannya.

KESIMPULAN

Ketercapaian dari misi yang diusung oleh kegiatan PkM ini mengenai peran penting BUMDes dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di Desa Pulias sudah baik. Masyarakat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana mengoptimalkan potensi Desa Pulias sehingga dapat bernilai komersil yang bermanfaat untuk mendukung pendapatan masyarakat setempat. Selain itu pengelolaan administrasi keuangan BUMDes juga sangat krusial sehingga diharapkan dapat tercipta sinergitas antara pemerintah dan masyarakat desa yang terwujud dalam pengelolaan BUMDes yang kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan keberlanjutan. Sehingga perekonomian desa bisa berjalan secara mandiri, efektif dan profesional dan dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pulias. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa misi atau tujuan kegiatan ini dapat tercapai.

DAFTAR RUJUKAN

- Masek, A., & Sulaiman, Y. (2011). The effect of problem based learning on critical thinking ability: atheoretical and empirical review. *International Review of Social Sciences and Humanities*, 2(1), 215-221.
- Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal ElRiyasah*, 5(1), 32-40.
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan (Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta). *Modus*, 28(2), 155-167.
- Arfianto, A.E.W., & Balahmar, A.R.U. (2014). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 2(1), 47-56.
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424- 440.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Pendampingan Bagi Dosen STIE Mujahidin Pemutakhiran Dan Integrasi Data Sinta

Moh. Sabran A.¹, Ayuwandira M. Morad²

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin

²Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin

Abstrak

Tri dharma perguruan tinggi menjadi kewajiban setiap dosen untuk dilaksanakan. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU No 14 tahun 2005). Melalui kegiatan ini, tim menjelaskan kepada setiap dosen mengenai perubahan yang terdapat dalam portal SINTA. Pendampingan pemutakhiran data SINTA bertujuan untuk mengecek kembali data-data luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan oleh setiap dosen. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengecek data profil setiap dosen. Dengan demikian berlangsung juga diskusi antara dosen dan juga tim LPPM mengenai sinkronisasi data dalam SINTA. metode pelaksanaan kegiatan yakni memberikan penjelasan tools dan pendampingan langsung kepada setiap dosen. adapun pelaksanaan pendampingan dapat digambarkan sebagai berikut : pentingnya pemutakhiran data SINTA, informasi terkait perubahan tools pada SINTA selanjutnya informasi terkait perubahan tools pada SINTA yang perlu diketahui oleh dosen, dan Pendampingan Sinkronisasi.

Keywords: Pemutakhiran data SINTA, Dosen.

Abstract

The Tri Dharma of Higher Education is the obligation of every lecturer to be implemented. Lecturers are professional educators and scientists with the main task of transforming, developing, and disseminating science, technology, and art through education, research, and community service (Law No. 14 of 2005). Through this activity, the team explained to each lecturer about the changes contained in the SINTA portal. Assistance in updating the SINTA data aims to re-check the data on research outputs and community service that has been carried out by each lecturer. In addition, this activity also aims to check the profile data of each lecturer. Thus, discussions took place between lecturers and the LPPM team regarding data synchronization in SINTA. the method of implementing the activity is to provide an explanation of the tools and direct assistance to each lecturer. As for the implementation of mentoring, it can be described as follows: the importance of updating SINTA data, information related to changes in tools at SINTA, then information related to changes in tools at SINTA that lecturers need to know, and Synchronization Assistance.

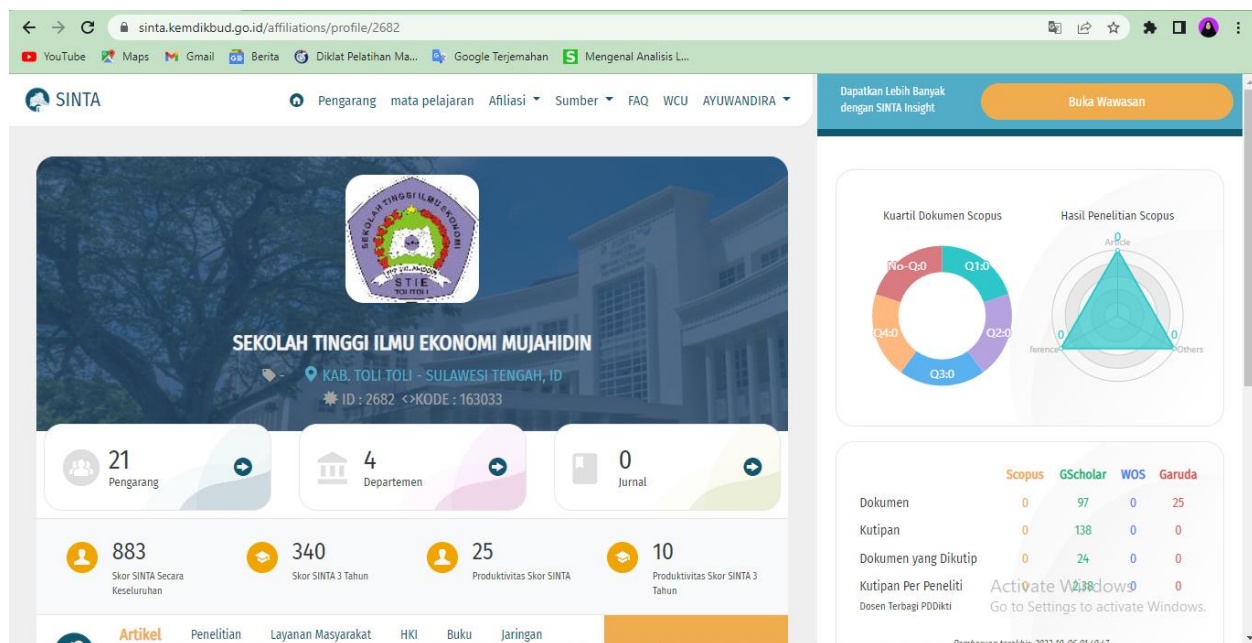
Keywords: SINTA data updating, Lecturer.

PENDAHULUAN

Tri dharma perguruan tinggi menjadi kewajiban setiap dosen untuk dilaksanakan. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU No 14 tahun 2005). dalam hal ini dua dharma yang juga

perlu dilakukan pendataan baik manual maupun pendataan melalui system yang telah dibuat dan ditetapkan oleh kementrian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi republic Indonesia. selanjutnya karena pentingnya pemutakhiran data pada SINTA merupakan ketetapan yang dikeluarkan oleh KEMENRISTEK melalui surat dengan nomor 0620/E5.5/AL.04/2022 tanggal 17 Juli 2022 tentang pemutakhiran data pada SINTA selajutnya surat nomor 0789/E5.5/AL.04/2022 tanggal 22 Agustus 2022 tentang Perpajangan batas Waktu Pemutakhiran data pada SINTA.

Pengintegrasian hasil-hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan karya-karya ilmiah yang telah dilaksanakan dosen perlu di laporkan oleh dosen. pelaporan ini dapat dilakukan dengan pemutakhiran data penelitian, pengabdian kepada masyarakat ataupun karya ilmiah lainnya pada akun Science and Technology Index (SINTA). untuk melakukan pemutakhiran data dosen perlu mengintegrasikan karya ilmiah baik yang terindex garuda, google scholar, scopus, wos dengan SINTA. SINTA (Science and Technology Index) merupakan portal yang berisi tentang pengukuran kinerja Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, author, kinerja jurnal dan kinerja institusi Iptek. pemutakhiran ini juga dilakukan karena adanya pembaharuan pada system SINTA sehingga dosen perlu diberikan pendampingan.



Gambar SINTA Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin

Selain itu pemutakhiran data pada sinta menjadi tolak ukur KEMERISTEK dalam melakukan pendataan klasterisasi penelitian. sehingga perguruan tinggi perlu melakukan update pada sinta. untuk dapat memenuhi kewajiban tersebut maka perlu pendampingan bagi dosen dalam melakukan pemutakhiran dan integrasi data Pada SINTA.

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan di laboratorium komputer sekolah tinggi ilmu ekonomi mujahidin, dikarenakan masih banyak dosen yang perlu melakukan pemutakhiran data

SINTA, pendampingan dilanjutkan di hari selanjutnya dengan dilaksanakan pendampingan perdosen yang langsung keruang kerja LPPM.

Melalui kegiatan ini, tim menjelaskan kepada setiap dosen mengenai perubahan yang terdapat dalam portal SINTA. Pendampingan pemutakhiran data SINTA bertujuan untuk mengecek kembali data-data luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan oleh setiap dosen. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengecek data profil setiap dosen. Dengan demikian berlangsung juga diskusi antara dosen dan juga tim LPPM mengenai sinkronisasi data dalam SINTA. Masih ada beberapa dosen yang belum mempunyai akun SINTA sehingga perlu adanya pendampingan.

METODE PELAKSANAAN

Metode secara etimologi berasal dari bahasa Yunani “*metodos*” yang berasal dari dua suku kata yaitu *metha* dan *hodos*, *metha* berarti melalui dan *hodos* artinya jalan atau cara (Prayogi, 2022). Metode memiliki arti jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan, atau suatu cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan, atau cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pengajaran. Jadi metode lebih memperlihatkan sebagai alat untuk mengolah dan mengembangkan suatu gagasan sehingga menghasilkan suatu teori atau temuan.

Adapun metode pelaksanaan kegiatan yakni memberikan penjelasan tools dan pendampingan langsung kepada setiap dosen. pendampingan dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan dosen karena ada beberapa perubahan pada *tools* SINTA sehingga dosen perlu diberikan informasi cara penggunaan. metode selanjutnya dilakukan pendampingan secara mandiri bagi dosen untuk pembuatan akun SINTA. kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 19 agustus sampai dengan 31 agustus 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendampingan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh kampus baik berupa ruangan yang nyaman, perlengkapan kegiatan, wifi yang memadai, serta memberikan konsumsi bagi dosen. adapun pelaksanaan pendampingan dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pentingnya pemutakhiran data SINTA

Kegiatan diawali dengan pemaparan pentingnya pemutakhiran data SINTA untuk Perguruan Tinggi terutama dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin. selain itu pemutakhiran data SINTA masing-masing dosen sangat penting untuk penilaian klasterisasi oleh kemenristek serta juga untuk kemajuan karir dosen. dengan integrasi dan sinkronisasi data SINTA dengan sistem akan memudahkan dalam proses klaim karya ilmiah baik penelitian, pengabdian masyarakat, haki, dll.

2. informasi terkait perubahan tools pada SINTA

Selanjutnya informasi terkait perubahan tools pada SINTA yang perlu diketahui oleh dosen. dibagian ini kami menjelaskan beberapa perubahan pada SINTA yang langsung memberikan arahan dan petunjuk secara langsung melalui share materi di slide yang telah disediakan. kemudain dosen di arahkan untuk mengisi dan mengupdate profil pada SINTA.



Gambar Dosen STIE Mujahidin sedang mengupdate profile SINTA

3. Pendampingan untuk Sinkronisasi

Pada bagian ini kami langsung mendampingi dosen satu persatu, dimulai dengan mengecek semua karya ilmiah dosen baik penelitian yang terdata indeks google scholar dan garuda, pengabdian kepada masyarakat, buku dan haki tiap-tiap dosen secara berurutan.



Gambar Dosen STIE Mujahidin sedang mensinkronisasi SINTA

KESIMPULAN

Pemutakhiran data pada sinta menjadi kewajiban dosen. sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini yakni mengecek kembali data-data luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan oleh setiap dosen. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mengecek data profil setiap dosen. Kegiatan pendampingan Pemutakhiran dan integrasi Data SINTA dapat dilaksanakan dengan baik. antusias dosen dalam melakukan sinkronisasi sangat tinggi sehingga kegiatan ini dapat dilangsungkan. dukungan dari pihak kampus juga menjadi faktor kelancaran kegiatan ini. Dari kegiatan ini juga Secara Keseluruhan score SINTA Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin naik menjadi 833 dengan jumlah akun sinta sebanyak 21 dosen.

DAFTAR PUSTAKA

- Prayogi, A., & Kirom, M. I. (2022). Pendampingan Pengembangan Digitalisasi UMKM Masyarakat Desa Wonoyoso Pekalongan Menghadapi Era New Normal. *Jurnal Pengabdian Pendidikan Masyarakat (JPPM)*, 3(1), 14-24.
- Prayogi, A., & Chofifah, S. (2022). Pendampingan pembelajaran kitab risalatul mahid bagi santri wati dimadra sahdiniyah nu Desa sidorejo kabupaten pekalongan. *PakMas (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*. Vol. 2 No. 1 Mei 2022 Hal. 07-14.

Program Kemitraan Masyarakat Melalui Pengembangan Manajemen Keuangan BUMDES Usaha Bersama Di Desa Kapas Kecamatan Dakompamean Kabupaten Tolitoli.

Edi Yanto, Randy Aziz Syahputra

Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin

Abstrak

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang dilakukan merupakan kegiatan sosialisasi sekaligus pendampingan pelatihan manajemen keuangan Bumdes di Desa Kapas Kecamatan Dakopamean Kabupaten Tolitoli melalui pengetahuan dan pemahaman terkait pencatatan transaksi keuangan dan penyusunan laporannya hingga pada tahapan penutupan buku. Dalam tahapan kegiatan, peserta yang merupakan pengurus Bumdes Usaha Bersama Desa Kapas dapat mempraktekkan tahapan demi tahapan di dalam manajemen keuangan suatu entitas dalam hal ini Bumdes dengan baik dan benar. Tentunya kegiatan ini tidak berhenti saat itu juga, namun peserta juga difasilitasi untuk terus berkonsultasi dengan narasumber kapanpun dan dimanapun sesuai kebutuhan. Manfaat yang daiadapatkan dari kegiatan ini adalah pengurus Bumdes dapat mengontrol atau mengendalikan keuangan melalui informasi yang tersaji dalam analisa laporan keuangan yang telah disusun.

Kata Kunci: Pengembangan Manajemen Keuangan, Bumdes

Abstract

The Community Partnership Program (CPP) carried out is a socialization activity as well as assistance in financial management training for Bumdes in Kapas Village, Dakopamean District, Tolitoli Regency through knowledge and understanding related to recording financial transactions and preparing reports up to the closing stage of the book. In the activity stage, participants who are administrators of the Bumdes Usaha Bersama Desa Kapas can practice step by step in the financial management of an entity in this case the Bumdes properly and correctly. Of course, this activity does not stop right away, but participants are also facilitated to continue to consult with resource persons whenever and wherever as needed. The benefit from this activity is that the Bumdes management can control or control finances through the information presented in the analysis of the financial statements that have been prepared.

Keywords: Financial Management Development, Bumdes

PENDAHULUAN

Desa Kapas merupakan salah satu desa di Kecamatan Dakopamean Kabupaten Tolitoli berjarak 53,7 km dari Kampus STIE Mujahidin. Desa Kapas memiliki beberapa potensi wilayah diantaranya adalah; (1) Daerah Pariwisata; (2) Peternakan; (3) Perikanan dan; (4) Perkebunan. Di desa ini, terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama resmi BUMDes Usaha Bersama Desa Kapas. Jumlah pengurus BUMDes adalah 3 orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. BUMDes Usaha Bersama memiliki visi *“Terbangunya tata kelola usaha yang baik guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan terdepan”*. Untuk Misinya adalah: (1) Menciptakan lapangan pekerjaan; (2) Memberikan pelayanan yang maksimal; (3) Menggali potensi Desa untuk didayagunakan dan; (4) Membuka pola wirausaha masyarakat. Kegiatan usaha bergerak dalam bidang peternakan sapi dan jasa internet wifi. Saat ini telah memiliki satu unit mobil operasional yang merupakan hibah pemberian dari pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli. Tidak hanya itu, hewan ternak sapi yang dimiliki berjumlah sampai 14 ekor sapi dengan estimasi nilai omzet penjualan sebesar ± Rp 210.000.000,-.

Dalam beberapa tahun terakhir, Bumdes memiliki kemajuan pesat yang dibuktikan dengan aset yang dimiliki berupa satu unit mobil operasional dan 14 ekor hewan ternak yang dimiliki. Dalam hal ini, perkembangan pengelolaan BUMDes bukan hanya dilihat dari segi operasional usaha namun juga dari segi manajemen keuangan melalui pembukuan dan analisa laporan keuangan entitas BUMDes.

Penerapan manajemen keuangan melalui pembukuan dan analisa laporan keuangan diharapkan menjadi bekal bagi pengurus di dalam struktur organisasi BUMDes Usaha Bersama di Desa Kapas untuk dapat memajukan dan mengembangkan pengelolaan keuangan BUMDes. Hal ini sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan BUMDes yakni partisipatif, transparansi, dan akuntabel. Sedangkan tujuan dari keberadaan badan usaha yang dimiliki desa adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka masih terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan manajemen BUMDes utamanya di bagian pengembangan manajemen keuangan. Hal ini menjadi penting guna membangun BUMDes yang lebih maju dan lebih akuntabel untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Dalam hal perwujudan solusi dan penyelesaian permasalahan BUMDes Usaha Bersama Desa Kapas, maka dengan ini dilakukan program kemitraan masyarakat dengan pendekatan *problem solving* dan partisipatif. Pendekatan ini dapat mengetahui dan menyelesaikan langsung permasalahan yang dihadapi mitra sehingga lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Untuk pendekatan partisipatif yang diterapkan merupakan strategi yang baik dimana anggota mitra menjadi fokus utama dalam hal setiap permasalahan dan bagaimana sebenarnya langkah yang tepat untuk menyelesaikannya. Hal ini dikarenakan mitra lah yang mengetahui setiap permasalahan yang dihadapi diinternalnya masing-masing. Terkait tim pengusul selaku akademisi, bertindak sebagai narasumber dan fasilitator yang akan menjembatani setiap permasalahan dan penyelesaiannya dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peserta kegiatan PKM bertajuk Pengembangan Manajemen Keuangan Melalui Pembukuan Dan Analisa Laporan Keuangan Pada Bumdes Di Desa Kapas Kecamatan Dakopamean Kabupaten Tolitoli merupakan pengurus Bumdes Usaha Bersama dengan jabatan sebagai ketua, sekretaris dan bendahara. Ketiganya merupakan tiang penegak Bumdes sehingga bisa tetap eksis dan memberikan yang terbaik bagi perekonomian di desa untuk kesejahteraan masyarakat. Berikut ini adalah gambar pelaksanaan kegiatan PKM di Desa Kapas Kecamatan Dakopamean Kabupaten Tolitoli yang diselenggarakan pada tanggal 7 Agustus 2022.





Gambar: Pelaksanaan Kegiatan PKM Pengembangan Manajemen Keuangan BUMDES Usaha Bersama di Desa Kapas

Dalam pelaksanaan kegiatan PKM, terlebih dahulu dibuka oleh bapak Kepala Desa Kapas didampingi oleh Sekertaris Desa (Sekdes). Beliau turut memberikan apresiasi kepada dosen-dosen STIE Mujahidin yang menginisiasi dan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi sekaligus pendampingan dan pelatihan peserta dalam hal pembuatan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan Bumdes. Nampak antusias juga dari pengurus Bumdes yang ikut merasakan terbantuan dengan adanya pendampingan dan pelatihan yang diadakan. Dalam kegiatan ini, peserta dapat mengetahui bagaimana menyusun laporan keuangan Bumdes yang baik dan benar dengan melakukan penyesuaian terhadap siklus akuntansi yakni mulai dari transaksi, pencatatan, pengikhtisaran, pengelompokkan, penyesuaian, penyusunan laporan keuangan dan sampai pada penutupan buku.



Kegiatan PKM melalui pendampingan pelatihan pengembangan manajemen keuangan Bumdes berlangsung dengan lancar dan sukses dengan didukung oleh aparat desa setempat dan antusiasme dari peserta kegiatan yang tersiri dari pengurus Bumdes. Sehingga diharapkan tujuan dari organisasi dalam hal ini Bumdes bisa terwujud dalam hal memajukan perekonomian di desa melalui Bumdes Usaha Bersama Desa Kapas Kecamatan Dakopamean Kabupaten Tolitoli.

KESIMPULAN

Permasalahan Bumdes Usaha Bersama Desa Kapas Kecamatan Dakopamean Kabupaten Tolitoli terjawab dan terselesaikan dengan diadakannya sosialisasi sekaligus pendampingan pelatihan manajemen keuangan Bumdes melalui pembukuan dan penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar. Peserta kegiatan yang terdiri dari pengurus Bumdes nampak antusias dan bisa menyelesaikan dengan baik tahapan dalam penyusunan laporan keuangan sampai dengan tahapan akhir yakni tutup buku. Dengan demikian pihak manajemen Bumdes Usaha Bersama Desa Kapas bisa melakukan pengelolaan dan pengendalian terhadap keuangan Bumdes melalui informasi yang didapatkan pada analisa laporan keuangan yang telah disusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Sihabuddin. 2021. Konsep, Analisis dan Tinjauan Manajemen Keuangan Bumdes. Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung.
- Sujarweni, V. W., & Jaya, I. M. L. M. (2019). Pengelolaan Keuangan Bumdes Sambimulyo di Kawasan Geoheritage â€œTebing Breksiâ€ Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, 1(2).
- Dimiyati, A., & Hanum, N. (2022). Peningkatan Kualitas Manajemen Keuangan Bumdes melalui Bimtek di Desa Ciampea Udik Kecamatan Ciampea. *DEDIKASI PKM*, 3(3), 391-396.
- Andi, W. M., Lestari, D., Semara, I. M. T., Parwati, K. S. M., & Wijaya, N. S. (2022). Meningkatkan kompetensi pengelola bumdes pada manajemen bisnis dan manajemen keuangan bumdes “panca artha mandiri” pemerintah desa dangin puri kauh Denpasar bali. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 2(1), 49-56.
- Biduri, S., Hariyanto, W., & Meiliza, D. R. (2020). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Bumdes “Sumber Rejeki”. *Prosiding SEMADIF*, 1.



LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mujahidin Tolitoli
Jln. Dr. Samratulangi No. 51 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli
Sulawesi Tengah 94513
Telp/WA +62 823 1256 3780
Email: ojs@stiemujahidin.ac.id / Lppm.stie.mujahidin@gmail.com